

Sengketa Dalam Perusahaan Joint Venture : Studi Kasus PT. Kalpataru Investama v. M.S.K Plantation Ltd

Airlangga Z. Pratama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20238227&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tesis ini membahas sengketa yang timbul di dalam perusahaan patungan atau yang juga sering disebut dengan perusahaan joint venture. Dalam perusahaan joint venture sengketa mungkin timbul antara patner asing dan patner lokal, maupun antara patner asing dengan pemerintah.

Tesis ini membahas sengketa yang sebenarnya bermula antara patner asing dan patner lokal, yang kemudian berujung menjadi sengketa antara patner asing dan pemerintah Republik Indonesia yaitu dengan Badan Koordiantor Penanaman Modal (BKPM). BKPM digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas surat pencabutan izin penanaman modal asing yang diajukan oleh patner lokal tanpa sepengetahuan dari patner asing.

Tesis ini juga membahas perkembangan perusahaan joint venture, dimana sebelumnya untuk penanaman modal asing di Indonesia tidak ada kewajiban untuk melakukan joint venture. Namun sejak terjadinya peristiwa Malari maka timbulah kewajiban untuk melakukan joint venture. Dibahas juga mengenai bentuk badan hukum sebuah perusahaan joint venture dalam hukum Indonesia.

Selain masalah tersebut di bahas juga mengenai pola penyelesaian sengketa dalam penanaman modal dimana cara yang ideal adalah bila timbul penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu musyawarah, apabila tidak tercapai kemudian diajukan ke arbitrase atau pengadilan.

.....This thesis research using normative legal research methods, the method of research which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. This thesis describes the disputes which arise in the joint venture, or who are also often called a joint venture company. In its joint venture partners dispute may arise between foreign and local partners, as well as between foreign partners with the government.

This thesis discusses the actual dispute began between foreign partners and local partners who then led into a dispute between foreign partners and the government of the Republic of Indonesia, namely the Capital Investment Coordinating Board (BKPM). BKPM was sued by the State Administrative Court for revocation of letters of foreign investment put forward by local partners without the knowledge of a foreign partner.

This thesis also discusses the development of a joint venture company, which previously for foreign investment in Indonesia, there is no obligation to do joint ventures. But since then the incident of Malari made obligation to do joint ventures. Considerations about the legal entity form a joint venture company under Indonesian law.

In addition to these problems are discussed also about the patterns of settlement of investment disputes in which the ideal way is when a dispute arises deliberation is done first, if not achieved then submitted to arbitration or court.